

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Pengendalian Internal Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Poppy Indrihastuti¹ Sri Indah² Grestiana Bili³

Email: poppy.indrihastuti@unitri.ac.id¹, indahsri729@gmail.com²,
gracebily2@gmail.com³

Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang

Abstract

This study aims to examine the effect of regional financial accounting systems, accessibility of financial reports and internal control on regional financial management accountability. This research is a quantitative research. The population in this study were all parts involved in the management of regional finances in urban villages in the city of Malang. The sampling technique used is simple random sampling. The data collection technique used in this study is primary data in the form of questionnaires distributed to respondents. The analytical method used is multiple regression analysis with SPSS version 26. Based on the results of the study, it shows that the regional financial accounting system, accessibility of financial statements, and internal control have a $t_{count} > t_{table}$ ($121.950 > 2.69$ with a significant value of $0.0000 < 0.05$ ($\alpha=5\%$). Based on the results of the study, it can be concluded that the variables X1, X2, X3, and X4 together have an effect on Y, a significant positive effect on the accountability of regional financial management.

Keyword: *regional financial accounting system, accessibility of financial reports, internal control, accountability of financial statements*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bagian yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di kelurahan di kota Malang. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah multiple regression analysis dengan SPSS versi 26. Hasil dan pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal memiliki $t_{count} > t_{table}$ ($121,950 > 2,69$ dengan nilai signifikan sebesar $0,0000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 bersama-sama memiliki efek pada Y, efek positif yang signifikan pada akuntabilitas manajemen keuangan daerah.

Kata kunci : *sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian internal, akuntabilitas laporan keuangan*

PENDAHULUAN

Pengkajian sumber daya manusia terhadap tingkat pendapatan, pengetahuan, serta kesadaran perekonomian atau bisnis, investasi maupun pendapatan nasional

hampir seluruh dunia. Pembangunan nasional harus berlangsung secara terus melonjak serta dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat. (S. Indah et all, 2021). Di era sekarang, masyarakat Indonesia menuntut agar pemerintah mampu mengelola pemerintahan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Agar tercipta akuntabilitas, pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi laporan keuangan daerah yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik tanpa harus ada yang di tutupi atau biasa disebut dengan transparansi.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan *good government* dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menurut Rohman, (2009), aksesibilitas dalam perspektif tata adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman serta kecepatan yang wajar. Mulyana (2006) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Penyajian informasi aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain, laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Somad, 2016).

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas pemerintah daerah. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan “serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer”. Kurniawati (2016) dan Handri, Rifa dan Rhamawati (2014) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim (2007) menjelaskan akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan untuk dipertanggung jawabkan. Rakyat sebagai pemberi amanah pada wakilnya di DPRD memberikan tugas dan tanggung jawab agar DPRD Bersama Lembaga Eksekutif untuk mengelola keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas perihal yang dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal yang telah terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan (Renyowijoyo, 2013). Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat empat tahapan yang dapat dilakukan (Halim, 2007), yaitu: (1) Pelaporan merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh *steward* atau pemerintah untuk mempertanggung jawabkan atau melaporkan hasil kinerjanya dalam mengelola sumber daya atau dana publik; (2) Pencarian informasi atau investigasi merupakan kewenangan

dari pemilik sumber dana atau masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola sumber dana; (3) Penilaian atau verifikasi merupakan kewenangan dari pemilik sumber dana atau masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola sumber dana; dan (4) Pengawasan merupakan tindak pengendalian yang dilakukan oleh pemilik sumber dana untuk mengawasi agar tujuan tercapai.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012:35) akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut: "suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan". Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan (Superdi, 2017).

Dalam menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah terdapat beberapa indikator yang menjadi prosedur dalam menjalankan sistem Akuntansi Keuangan Daerah dari proses *input* hingga *ouput* agar berfungsi dengan baik (Superdi, 2017), yaitu: (1) Basis akuntansi sebagai suatu kegiatan pada transaksi yang dilakukan dari pencatatan hingga pelaporan laporan keuangan; (2) Unsur-unsur laporan Realisasi Anggaran, mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan pada sumber dan alokasi dana pemerintahan selama periode tersebut; (3) Penyusunan APBD, seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah berkenaan uang dan barang harus dianggarkan dalam APBD; dan (4) Penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP 12 Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan

Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran 1, menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002 dalam Hehanussa, 2015). Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No.1, alinea 49 (peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan investasi jangka panjang, aset tetap kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana.

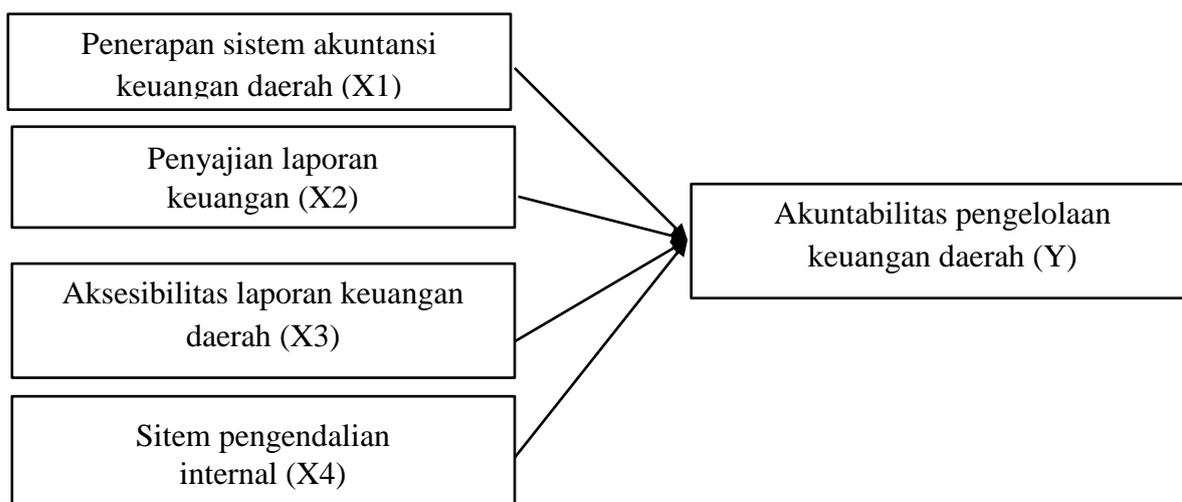
Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Wijaya, Anim, dan Sutrisna (2016) Aksesibilitas adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik laporan keuangan yang

dapat dibaca dan dipahami. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Fauziyah, 2017). Pemerintah daerah harus memenuhi kriteria agar dapat dikatakan handal dan terpercaya dalam melaporkan kinerjanya berupa publikasi laporan keuangan. Berikut ini merupakan kriteria dari aksesibilitas laporan keuangan (Fauziyah dan Handayani, 2017) yaitu: (1) Keterbukaan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media masa; (2) Kemudahan, yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi keuangan daerah; dan (3) *Accessible* (mudah diakses), yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan kedua pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163). Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) menurut UU No.60 Tahun 2008. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Mulyadi (2013:163), tujuan sistem pengendalian internal adalah: (1) Menjaga kekayaan organisasi; (2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi; (3) Mendorong efisiensi; dan (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen



Gambar 1
Kerangka Konsep Penelitian

Hipotesis Penelitian

1. Diduga sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Diduga aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Diduga pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
4. Diduga akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian ini merupakan penelitian explanatory. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada satuan kerja daerah Kota Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Malang. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Malang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner, yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden Bagian Keuangan diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Kota Malang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, sedangkan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1) penyajian laporan keuangan daerah (X2), Aksesibilitas laporan keuangan daerah (X3), dan Sistem Pengendalian Internal (X4).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan survey lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada pegawai bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada SKPD di kabupaten Malang. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah Regresi linier berganda yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*variable independen*) terhadap satu variabel tak bebas (*variabel dependen*). Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. *Statistical package for sosial science* (SPSS) akan digunakan untuk membantu proses analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada tanggal 01 Januari 2017 UPT pengembangan mutu produk industri dan teknologi kreatif (UPT PMPI & TK) Malang dibentuk, berawal dari bidang standarisasi dan desain produk industri (SDPI) yang dibentuk pada tahun 2009 dan berjalan sampai 8 tahun. Alasan dibentuknya UPT PMPI (pengembangan mutu produk industri), karena SDPI memiliki tugas yang sama dengan PMPI, maka bidang SDPI akhirnya dikembangkan

menjadi UPT PMPI (pengembangan mutu produk industri). Dengan adanya UPT PMPI & TK dapat berperan dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk IKM dengan pelatihan-pelatihan atau pembinaan teknologi serta berbagai fasilitasi. Terdapat beberapa fasilitasi yang diberikan oleh UPT PMPI & TK diantaranya: kekayaan intelektual, fasilitasi teknologi kreatif serta fasilitasi standarisasi bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) yang dilaksanakan oleh UPT PMPI & TK Malang sudah berjalan hampir lima tahun.

Adapun deksripsi gambaran umum responden meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah karyawan	Presentase
1	Laki-laki	22	63%
2	Perempuan	13	37%
Jumlah		35	100%

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Dari hasil tabel di atas dapat diketahui jumlah responden laki-laki lebih besar daripada jumlah responden perempuan, dimana jumlah responden perempuan hanya 13, sedangkan responden laki-laki sebesar 22. Data tersebut dapat diindikasikan bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki dari keseluruhan total 35 responden.

Tabel 2
Data Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah karyawan	Persentase
1	<36	13	37%
2	30-35	8	23%
3	>40	14	40%
Jumlah		35	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Dari hasil tabel diatas dapat menunjukkan dari total 35 responden, responden yang berusia <36 tahun berjumlah 13 orang sedangkan yang usia antara 30-35 tahun sebanyak 8 orang. responden yang berusia antara >40 tahun sebanyak 14 orang. jadi sebagian besar menjadi responden dalam penelitian ini memiliki >40 tahun sebanyak 40% dari jumlah total responden.

Tabel 3
Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir

No	Pendidikan terakhir	Jumlah karyawan	Persentase
1	S1	12	34%
2	S2	4	11%
3	D3	11	32%
4	SLTA	8	23%
Jumlah		35	100%

Sumber: Data Primer diolah, (2022).

Dari hasil tabel diatas, dapat diketahui bahwa paling banyak responden memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 12 orang (34%) sedangkan S2 sebanyak 4 orang (11%) D3 sebanyak 11 orang (32%) dan SLTA sebanyak 8 orang (23%). Artinya dilihat dari tingkat pendidikan bahwa para pegawai sudah memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan pekerjaannya.

Dari hasil tabel dibawah, dapat diketahui bahwa mayoritas responden sudah lama bekerja 1-5 tahun berjumlah 15 orang pegawai. Artinya sebagian karyawan sudah memiliki pengalaman cukup lama dibidang tugas dan pekerjaannya.

Tabel 4
Data responden berdasarkan lama kerja

No	Lama bekerja	Jumlah pegawai	Persentase
1	< 1 tahun	9	26%
2	1-5 Tahun	15	43%
3	>10 tahun	11	31%
Jumlah		35	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dari hasil tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden sudah lama bekerja 1-5 tahun berjumlah 15 orang karyawan. Artinya sebagian karyawan sudah memiliki pengalaman cukup lama bekerja.

Tabel 5
Data responden berdasarkan gaji

No	Jumlah gaji	Jumlah Pegawai	Persentase
1	< Rp 1.000.000	5	14%
2	Rp 1.000.000,00- Rp 4.000.000,00	17	49%
3	>Rp 5.000.000,00	13	37%
Jumlah		35	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dari hasil tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menerima gaji antara 1.000.000,00- 4.000.000,00. Artinya sebanyak 17 orang karyawan menerima gaji setiap bulan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Variabel bebas pada penelitian ini ada 4 yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1), penyajian laporan keuangan (X2), aksesibilitas laporan keuangan daerah ((X3) dan sistem pengendalian internal (X4) yang distribusi frekuensinya adalah sebagai berikut: Untuk menilai variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1), peneliti mengolah jawaban kuesioner menjadi sebuah data, pertanyaan yang berkaitan dengan variabel ini terdiri 10 pertanyaan, penjelasan berdasarkan indikator variabel penelitian, peneliti menjelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Dari Tabel 6 dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar responden menjawab “setujuh” dengan presentase 47%, yang berarti penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan kebijakan dan prosedur sistem penggajian dilaksanakan oleh orang yang berkompeten,

pimpinan bertindak secara intensif untuk mengurangi tindakan pegawai yang tidak jujur, adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan yang ada.

Tabel 6
Indikator penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1)

Butir Pertanyaan	Penilaian responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS		R	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	9	26	18	51	5	14	3	9	0	0	35	100
2	5	14	16	46	8	23	6	17	0	0	35	100
3	4	11	17	49	7	20	7	20	0	0	35	100
4	6	17	15	43	6	17	5	14	3	9	35	100
5	3	9	19	54	5	14	8	23	0	0	35	100
6	7	20	20	57	3	8	4	12	1	3	35	100
7	10	29	11	32	3	8	6	17	5	14	35	100
8	8	23	13	37	9	26	5	14	0	0	35	100
9	6	17	17	48	9	26	3	9	0	0	35	100
10	7	20	18	52	5	14	5	14	0	0	35	100
Jumlah	65	-	164	-	60	-	52	-	9	-	350	-
Rata-rata %	-	18	-	47	-	17	-	15	-	2	-	100

Sumber: Data Primer diolah, (2022)

Untuk menilai variabel penyajian laporan keuangan ((X2) peneliti mengolah hasil jawaban menjadi sebuah data, pertanyaan yang berkaitan dengan variabel ini terdiri 9 pertanyaan, penjelasan berdasarkan indikator variabel penelitian, peneliti jelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 7
Penyajian laporan keuangan (X2)

Butir Pertanyaan	Penilaian responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS		R	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	7	20	16	46	7	20	5	14	0	0	35	100
2	6	17	15	43	9	26	5	14	0	0	35	100
3	8	23	17	49	6	17	4	11	0	0	35	100
4	9	26	14	40	9	26	3	8	0	0	35	100
5	5	14	13	37	8	23	9	26	0	0	35	100
6	10	29	11	31	9	26	5	14	0	0	35	100
7	9	26	13	37	6	17	5	14	2	6	35	100
8	7	20	18	52	4	11	6	17	0	0	35	100
9	4	12	19	54	5	14	5	14	2	6	35	100
10	65	-	136	-	63	-	47	-	4	-	315	100
Jumlah	-	21	-	43	-	20	-	15	-	1	-	-
Rata-rata %	-	18	-	47	-	17	-	15	-	2	-	100

Sumber: Data Primer diolah, (2022)

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar responden menjawab setuju dengan presentase 43% yang berarti dengan adanya penyajian laporan keuangan terjaminnya penyajian laporan keuangan dapat memenuhi aktivitas penyajian laporan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menilai variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) peneliti mengolah hasil jawaban menjadi sebuah data, pertanyaan yang berkaitan dengan variabel ini dari 3 pertanyaan, penjelasan berdasarkan indikator variabel penelitian,

peneliti menjelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini. Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar responden menjawab setuju dengan 51%, yang berarti aksesibilitas laporan keuangan daerah tentang aksesibilitas laporan keuangan daerah dan dijamin keabsaham dengan penyajian laporan keuangan.

Tabel 8
Aksesibilitas laporan keuangan (X3)

Butir Pertanyaan	Penilaian responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS		R	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	1	3	18	51	7	20	7	20	2	6	35	100
2	3	9	17	48	8	23	4	11	3	9	35	100
3	4	12	19	54	6	17	5	14	1	3	35	100
Jumlah	8	-	54	-	21	-	16	-	6	-	105	-
Rata-rata %	-	8	-	51	-	20	-	15	-	6	-	100

Sumber :Data Primer diolah, 2022

Untuk menilai variabel sistem pengendalian internal (X3) peneliti mengolah hasil jawaban menjadi sebuah data, pertanyaan yang berkaitan dengan variabel ini terdiri dari 2 pertanyaan, penjelasan berdasar indikator, variabel penelitian, peneliti mjenjelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 9
Sistem Pengendalian Internal (X4)

Butir Pertanyaan	Penilaian responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS		R	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	5	14	15	43	6	17	5	14	4	12	35	100
2	7	20	17	49	7	20	4	11	0	0	35	100
Jumlah	12	-	32	-	13	-	9	-	4	-	70	-
Rata-rata %	-	17	-	46	-	19	-	12	-	6	-	100

Sumber data: primer yang diolah, (2022)

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden menjawab setuju dengan persentase 46% yang berarti adanya pemeriksaan kesesuaian adanya penyajian laporan keuangan terjaminnya sistem pengendalian internal dari kemungkinan aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Untuk menilai variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) peneliti mengolah hasil jawaban menjadi sebuah data, pertanyaan yang berkaitan dengan variabel ini terdiri dari 10 pertanyaan, penjelasan berdasar indikator, variabel penelitian, peneliti menjelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Dari hasil Tabel 10 dapat diketahui akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 45%. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen tidak menyalahkan gunakan kedudukannya untuk mengakses akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Tabel 10
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Butir Pertanyaan	Penilaian responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS		R	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	9	26	15	43	5	14	6	17	0	0	35	100
2	8	23	16	46	6	17	5	14	0	0	35	100
3	6	17	18	52	6	17	4	11	1	3	35	100
4	7	20	14	40	7	20	3	9	4	11	35	100
5	8	23	17	49	6	17	3	8	1	3	35	100
6	9	26	15	43	7	20	4	11	0	0	35	100
7	10	28	16	46	8	23	1	3	0	0	35	100
8	8	23	18	52	7	20	2	5	0	0	35	100
9	7	20	17	49	6	17	5	14	0	0	35	100
10	9	26	12	34	8	23	5	14	1	3	35	100
Jumlah	81	-	158	-	66	-	38	-	7	-	350	-
Rata-rata %	-	23	-	45	-	19	-	11	-	2	-	100

(sumber: data primer yang diolah,2022)

Hasil dari data penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis regresi yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a						
Model	Predictors	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	9.438	4.127		2.129	.042
	X1	.302	.098	.276	3.077	.004
	X2	.361	.109	.365	3.322	.002
	X3	.264	.092	.257	2.867	.008
	X4	.128	.057	.157	2.245	.032

a. Dependent Variable: Y

Ouput bagaian Coefficients: diketahui nilai constant sebesar 9.438 sedangkan X1 Sebesar 0, 302 X2 0,361, X3 0,264 dan X4 0,128 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis $Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4$ $Y = 9.438 + 0,302 X_1 + 0,361 X_2 + 0,264 X_3 + 0,128 X_4$. Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa nilai R square sebesar 0,942 yang berarti bahwa X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap (Y) sebesar 0,971 atau 94,2%, sedangkan 5,8% dipengaruhi oleh factor lain.

PEMBAHASAN

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah

daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan (Suprihastini et al., 2017). Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan daerah, termasuk laporan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintahan pusat. Hal ini membutuhkan sebuah sistem yang baik untuk proses pencatatan, administrasi, pengelolaan dan pelaporan terkait data keuangan daerah.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan dan mewujudkan akuntabilitas (Nordian, 2010). Penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diterima umum. Penyajian informasi yang utuh pasti menginformasikan mengenai semua kegiatan yang terjadi di dalam suatu entitas sehingga ini merupakan sebuah bentuk entitas tersebut. Penyajian informasi yang akan mewujudkan akuntabilitas publik karena penyajian informasi yang utuh akan menggambarkan kinerja sesungguhnya dari suatu entitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari entitas kepada publik. Penyajian informasi yang utuh merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang baik.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ketempat lainnya untuk memudahkan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari satu tempat ketempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang memperoleh informasi laporan keuangan. Laporan keuangan harus dapat di mengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan yang mau berusaha untuk memahaminya.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Maryanto, et.al, 2019). Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berdasarkan dalam peraturan pemerintah. Informasi keuangan didalam laporan keuangan dapat mmbrikn manfaat untuk mningkatkan akuntabilitas para manajer, kepala daerah dan para pejabat pmda ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar tetapi juga pada asset dan utang yang mereka Kelola. Untuk meningkatkan aktivitas pemerintah daerah pemerintah daerah.

Aliyah dan Nahar (2012) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor utama untuk mewujudkan akuntabilitas adalah

dengan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sistem pengendalian internal

Sistem pengendalian didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem pengendalian internal merupakan satu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan penekanan pengeluaran.

Akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian intern yang tepat. Hal ini karena dalam sistem pengendalian intern, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel yaitu dapat dipertanggung jawabkan (Rohman, A., Sasmito, C., & Rifa'i, M. 2016). Pengendalian pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya tindak penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai sehingga pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Sistem keuangan daerah adalah serangkaian prosedur manual yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data pencarian, pengikhtisaran sampai dengan posisi pelaporan keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi pemerintah daerah

KESIMPULAN

Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam mengelola keuangan untuk mendukung perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Variabel penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Masih kurangnya perhatian akan manfaat yang harus diberikan bagi para pengguna laporan keuangan melalui penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Variabel aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,. Hal ini dikarenakan masih belum banyak tersedianya informasi mengenai laporan keuangan pemda baik melalui media massa, internet, ataupun *website*. Variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian internal yang baik memberikan laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi andal dan relevan untuk pembuatan keputusan. Adanya sistem pengendalian internal yang baik memberikan keyakinan untuk tercapainya efektivitas juga efisiensi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan, serta keandalan laporan keuangan untuk perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti dan Aida Nahar, 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189.
- Fauziyah, M. R. (2017). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Volume 6, Nomor 6, Juni 2017 ISSN, 6(2017), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Fauziyah, Reza, M., dan Nurhandayani. (2017). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, Vol. 6, No. 6, 1-15.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, N.H. (2018) *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pemerintah Kota Tebing Tinggi*. Skripsi Universitas Sumatra Utara.
- Hehanussa, S.J. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. Skripsi. Universitas Kristen Indonesia.
- Kurniawati, M.M. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal ilmiah mahasiswa universitas jember*.
- Lily. 2015. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pada SKPD Kota Payakumbuh. *Jom fekon*, Vol.2, No.2.
- Maryanto, M., Sasmito, C., & Rifa'i, M. (2019). Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 74-85.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba. Empat, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurmuthmainnah, W. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara*. Skripsi, Universitas Hasannudin.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Renyowijoyo. M. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media

- Republik *Indonesia*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rohman, A., Sasmito, C., & Rifa'i, M. (2016). Manajemen Strategis Skpd Dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Terbaik Dinas Sosial Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(2).
- Sari, E., Azlina, N., & ' J. (2017) Pengaruh Sistem Penendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal online mahasiswa fakultas ekonomi universitas riau*, 4(1), 571-585.
- Soleha, Nurhayati, 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan*. Jurnal Etikonomi Vol.13 No.1 April 2014. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Superdi, 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD kabupaten Sijunjung). *JOM Fekom*, 4(1), pp. 2015-2029.
- Suprihastini, E., Akram, M. M., & Santoso, B. (2017). Effect of Regional Financial Accounting System, Internal Control Systems and Regional Financial Audit on Financial Accountability of Local Government. *International Conference and Call for Papers*, Jember, 830–852.
- Wijaya, Anim, dan Sutrisna, A. (2016). Determinan Aksibilitas dan Penyajian LKD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 1, 313–322.